



MediaTrend 14 (2) 2019 p. 219-228

# Media Trend

Berkala Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan

<http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend>

## Inflasi dan Siklus Bisnis Politik di Indonesia

Fitri Kartiasih<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Statistika STIS

### Informasi Artikel

Sejarah artikel:  
Diterima Februari 2019  
Disetujui Oktober 2019  
Dipublikasikan Oktober 2019

Keywords:  
Political Business Cycles,  
inflation,  
Exchange Rate,  
Money Supply

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the relationship between the political business cycle, inflation, the money supply (M1), the exchange rate, real GDP and real GDP growth in Indonesia. The data used in this study are quarterly data sourced from the Central Statistics Agency and Bank Indonesia with the study period starting in 2002: Q1 to 2018: Q3. The first estimation results using the Ordinary Least Square (OLS) method show that during the election period inflation will go down, but it has no significant effect. Post-election, inflation has increased. The Indonesian government during the 5 regimes showed that there was a cycle of expansion of economic growth, namely the end of the administration period except for Susilo Bambang Yudhoyono the second last period. Estimation results also show that the relationship between economic GDP growth with the political cycle is not significant, while the estimation results of the relationship between the money supply and the exchange rate with a significant political cycle. The results of this study also provide information that the political cycle in Indonesia is from the monetary side.*

© 2019 MediaTrend

Penulis korespondensi:  
E-mail: [fkartiasih@stis.ac.id](mailto:fkartiasih@stis.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4978>  
2460-7649 © 2019 MediaTrend. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

*Political Business Cycles* (PBC) atau Siklus Bisnis Politik adalah siklus ekonomi makro yang disebabkan oleh siklus politik. Siklus ini dipicu oleh *sekuens* pemilihan presiden, terbentuknya pemerintahan, bekerjanya pemerintahan, dan pemilihan untuk termin berikutnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Nordhaus (1975). Teori siklus bisnis politik merumuskan persepsi umum bahwa politisi menggunakan kebijakan ekonomi yang ekspansif dalam periode pra pemilu untuk meningkatkan peluang mereka untuk dipilih kembali.

*Theoretical framework* dari PBC dikembangkan oleh Nordhaus pada tahun 1975. Model Nordaus ini banyak digunakan sebagai dasar untuk studi-studi empiris. Model Nordaus (1975) didasari oleh Kurva Phillips, dengan asumsi pemilih adalah identik dan dicontohkan oleh pemilih perwakilan dan pemilih menyukai tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah. Pemilih memiliki memori yang singkat tentang masa lalu dan mereka cenderung memiliki tingkat diskon yang tinggi. Pemilih juga membangun harapan mereka secara adaptif dan mereka tidak memiliki pandangan ke masa depan. Salah satunya keinginan para politisi adalah terpilih kembali dan para politisi mengabaikan stabilitas ekonomi sebagai tujuan utama mereka.

Brender & Drazen, (2008) mengasumsikan bahwa pemilih memiliki ekspektasi rasional, namun terdapat informasi asimetris mengenai tingkat kompetensi dari petahana (*incumbent*). Petahana akan melakukan kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro pada periode pra-pemilihan dalam upaya untuk memberi sinyal kompetensi sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada pemilih dan meningkatkan peluang bagi mereka untuk dapat dipilih kembali. Terdapat dua hal yang

harus menjadi perhatian yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dimana terdapat *tradeoff* antara kedua hal tersebut yang dapat digambarkan dalam Kurva Phillips (SUKANTO, 2015). Inflasi akan terjadi jika permintaan agregat perekonomian melebihi kapasitas produksi perekonomian, namun sebaliknya, jika inflasi ingin ditekan terlalu rendah, konsekuensinya pertumbuhan juga akan lebih rendah (Dritsaki & Dritsaki, 2013).

Masyarakat sebagai pemilih menyukai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang menyukai inflasi. Intinya bagi pemerintah tugasnya menjadi tidak mudah karena harus menyeimbangkan pilihan kebijakan. Kompetensi dari pemerintah dicerminkan oleh kemampuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa harus menimbulkan inflasi yang tinggi atau menyeimbangkan antara pertumbuhan dan inflasi. Kompetensi inilah yang dinilai masyarakat dalam setiap siklus pemilu.

Sejumlah penelitian telah banyak melakukan analisa mengenai PBC baik di negara maju dan berkembang. Literatur terdahulu tentang PBC secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori (Sieg & Batool, 2012). Kategori pertama mencoba untuk menemukan siklus politik pada *outcome* makro ekonomi. Model ini fokus pada empat indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan pendapatan. Jangka pendek hasil kebijakan pada pertumbuhan dan pengangguran mungkin tidak cukup jelas bagi pemilih, jadi pemerintah mencoba untuk menstimulus variabel-variabel kebijakan yang memiliki manfaat moneter langsung kepada pemilih seperti transfer pemerintah, pemotongan pajak, subsidi, dan sebagainya. Kategori kedua yaitu PBC yang lebih fokus pada instrumen kebijakan dibandingkan dengan *outcome* makro ekonomi. Kategori ketiga yaitu PBC yang fokus pada kebijakan moneter (juga dikenal sebagai *political monetary cycle*)

(Hung & Hsieh, 2015).

Model PBC memiliki hasil empiris yang berbeda-beda di berbagai negara. Bukti adanya PBC telah ditemukan di AS untuk pembayaran transfer dan kebijakan moneter dan di Inggris untuk pengeluaran pemerintah dan pengangguran. Model PBC tidak berlaku di AS untuk pengangguran dan PDB.

Penelitian mengenai PBC di Indonesia lebih banyak membahas *political budget cycle* di tingkat pemerintah daerah. Penelitian Prabowo, (2016) menemukan bahwa alokasi dana hibah dan pengeluaran dana sosial di daerah *incumbent* selama tahun pemilu lebih tinggi dari pada sebelum pemilihan. Kis-Katos & Schulze, (2013) menganalisis efek PBC untuk pemilihan tidak langsung dan langsung di Indonesia dan menemukan bahwa PBC signifikan ada di kabupaten-kabupaten di Indonesia hanya untuk pemilihan langsung, bukan untuk pemilihan tidak langsung, dan PBC secara signifikan lebih kuat ketika calon-calon presiden mencalonkan diri untuk dipilih kembali. Winoto & Falikhatun, (2015) meneliti kemungkinan penyalahgunaan dana diskresioner dalam anggaran pemerintah daerah, tetapi tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial sebelum pemilihan lokal pada tahun 2015. Indonesia belum banyak literatur yang membahas PBC dari sisi moneter, sehingga paper ini mencoba untuk mengisi *gap* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara siklus bisnis politik, inflasi, jumlah uang beredar (M1), kurs, PDB riil dan pertumbuhan PDB riil di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Literatur empiris mengenai PBC terutama bergantung pada *reduced-form autoregressive* dari model *time-series*. Karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi berbagai

variabel makro ekonomi, maka dalam penelitian ini menggunakan prosedur *autoregressive* untuk menentukan bagaimana pemilihan umum mempengaruhi perilaku dari variabel-variabel makro ekonomi terutama variabel moneter. Sebagian besar uji empiris untuk PBC mengandalkan asumsi bahwa variabel makro ekonomi dihasilkan dari proses kovarians-stasioner yang dapat diestimasi menggunakan regresi autoregresif yang terbatas.

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari model (Sieg & Batool, 2012) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i Y_{t-i} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \varepsilon_t \quad (1)$$

Keterangan :  $Y_t$  adalah variabel siklus;  $D_1$  adalah *dummy* pilpres dimana bernilai satu (1) untuk tahun berlangsungnya pilpres, bernilai nol (0) jika lainnya;  $D_2$  adalah *dummy* pilpres dimana bernilai satu (1) untuk tahun berlangsungnya pilpres dan satu tahun sebelum berlangsungnya pilpres, bernilai nol (0) jika lainnya;  $D_3$  adalah *dummy* pilpres dimana bernilai satu (1) untuk satu tahun sesudah berlangsungnya pilpres, bernilai nol (0) jika lainnya;  $\varepsilon_t$  adalah *error term*. Pendekatan analisis intervensi ini menguji perubahan dalam proses yang mendasari pemilihan. Jadi penelitian ini menekankan untuk melihat tanda dan signifikansi dari parameter  $\delta_1, \delta_2$ , dan  $\delta_3$ .

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuartalan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan periode penelitian mulai tahun 2002:Q1 sampai dengan 2018:Q3. Variabel siklus ( $Y_t$ ) yang digunakan adalah inflasi, PDB riil, pertumbuhan PDB riil, jumlah uang beredar (M1) dan kurs. *Lag* dari variabel *dependent* setidaknya mengandung empat kuartal dikarenakan sifat musiman (*seasonal*) dari data yaitu  $p \geq 4$  pada persamaan (1). Struktur *lag* yang optimal digunakan kriteria

Schwarz, dimana untuk sampel periode penelitian ini tidak diperlukan *lag* tambahan. Berdasarkan Sieg & Batool (2012), untuk menguji dampak politik terhadap variabel makroekonomi, maka dalam penelitian ini digunakan variabel *dummy* politik atau *dummy* pemilihan presiden yang dibagi menjadi tiga yaitu D1, D2 dan D3.

Nilai tertinggi tercapai jika dengan hanya satu lemparan bola seluruh sasaran dapat dijatuhkan. Semua kegiatan dalam satu rantai nilai (*value chain*) sangat bergantung pada infrastruktur.

Model siklus bisnis politik yang selama ini menganggap kapasitas produksi perekonomian tak berubah

**Tabel 1.**  
**Tanggal Pemilihan Umum/Presiden Pasca Orde Baru**

Pemilihan Umum/Presiden	Tanggal
Pemilu 1999	7 Juni 1999
Pilpres 2004 putaran 1	5 Juli 2004
Pilpres 2004 putaran 2	20 September 2004
Pilpres 2009	8 Juli 2009
Pilpres 2014	9 Juli 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN

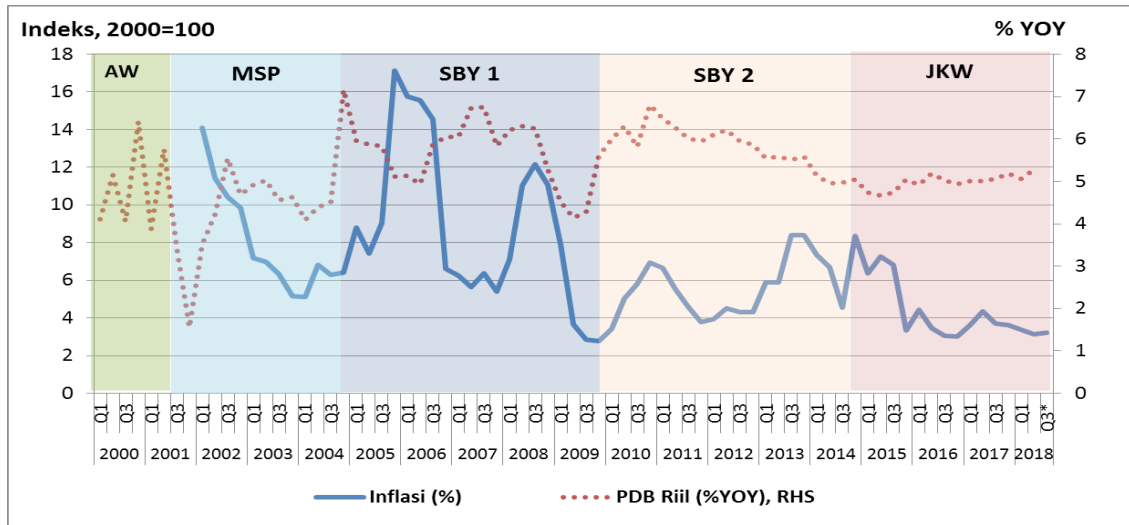
Siklus bisnis dan politik lima tahunan diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian. Petahana akan melakukan upaya keras untuk meluncurkan stimulus sehingga perekonomian tumbuh lebih tinggi. Kecenderungan itu terlihat dalam setiap momen politik terkait dengan pemilu. Sejak zaman Presiden Megawati hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kinerja ekonomi selalu bertumbuh menjelang momen pemilu. Peralihan dari Megawati ke SBY, pertumbuhan ekonomi naik dari 4,8% ke level 5%, namun setelah itu ekonomi menurun dan kembali meningkat jelang periode kedua SBY dari 4,5% menjadi 6%.

Perbedaan strategi pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi memilih untuk memusatkan diri pada pembangunan infrastruktur. Strategi ini berlainan dengan konsep sektoral dimana aksi direncanakan dan dilakukan untuk setiap sektor, strategi infrastruktur ini mirip dengan *strike* dalam permainan *bowling*.

karena stimulasi perekonomian dilakukan pada permintaan agregat dilakukan secara musiman untuk memengaruhi kinerja perekonomian jangka pendek sehingga menimbulkan pola siklus karena harus dilakukan lagi sesuai dengan waktu dari pemilu. Model pemerintahan Jokowi cukup berbeda dengan model klasik siklus bisnis politik karena yang dilakukan dari semula adalah membangun infrastruktur yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian sebagai dasar dari peningkatan produktivitas semua pelaku dalam perekonomian. Model siklus bisnis politik klasik perlu direvisi menjadi model jangka panjang (Klose, 2012).

## Inflasi

Inflasi yang terjadi di Indonesia mulai dari periode 2000:Q1 sampai dengan 2018:Q3 ditunjukkan oleh Gambar 1. Teori siklus bisnis politik menyatakan bahwa inflasi akan turun pada awal masa pemerintahan, namun untuk kasus Indonesia hanya terlihat pada masa awal pemerintahan Presiden Megawati



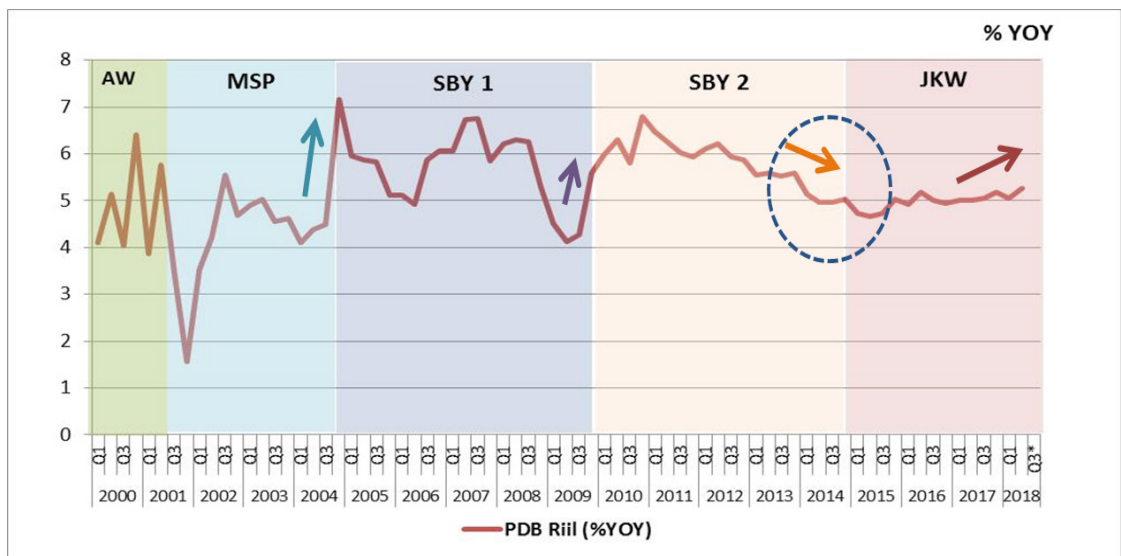
Sumber: BPS

**Gambar 1.**  
**Inflasi di Indonesia**

Soekarno Putri (MSW) dan Presiden Jokowi (JKW) seiring dengan koreksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia menggambarkan adanya *tradeoff* antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi, ketika terjadi ekspansi ekonomi inflasi juga tinggi. Inflasi yang lebih rendah tercapai saat terjadi

*downturn* perekonomian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY 1) masa awal, meskipun terjadi *downturn* perekonomian namun inflasi tinggi karena pengaruh meningkatnya harga minyak dunia pada periode tahun 2005 dan juga dikarenakan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2 kali.



Sumber: BPS

**Gambar 2.**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

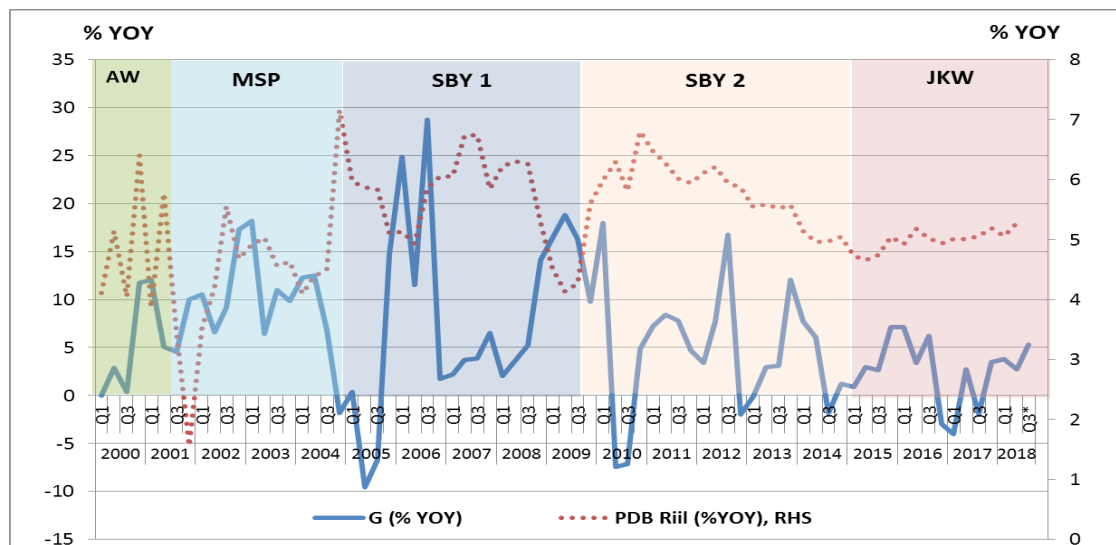
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono awal, inflasi tidak bisa diturunkan di *level* rendah karena adanya gangguan pasokan bahan makanan akibat faktor cuaca baik di domestik maupun global.

### Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 5 rezim pemerintahan, terlihat adanya siklus ekspansi pertumbuhan ekonomi pada akhir periode pemerintahan kecuali pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2. Akhir masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (AW) tidak terdapat ekspansi karena dilanjutkan oleh MSP (dapat dikecualikan dari siklus bisnis karena rezim digantikan MSP tanpa proses pemilu). Gambar 2 dapat dilihat bahwa ekspansi terbesar pada akhir pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,10 % (YOY) pada 2004Q1 menjadi 7,16% (YOY) pada 2004Q4.

politik yang diajukan pada pemilu selanjutnya, sedangkan *downturn* perekonomian hanya terdapat pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 1 (5,96% di 2005Q1 menjadi 5,11% di 2005Q4) dan Joko Widodo (5,04% di 2014Q4 menjadi 4,66% pada 2015Q2). Masa awal Susilo Bambang Yudhoyono 2 tidak terjadi *downturn* pertumbuhan ekonomi karena efek *capital inflow* ke *emerging markets*, termasuk Indonesia sebagai efek *Global Financial Crisis* di USA yang merembet ke negara maju lainnya.

Gambar 3 menunjukkan ekspansi ekonomi dengan kebijakan fiskal. Ekspansi pertumbuhan ekonomi melalui manipulasi *Aggregate Demand* (AD) masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dilakukan dengan cara privatisasi BUMN untuk pembayaran utang luar negeri. Masa Susilo Bambang Yudhoyono 1 ekspansi AD dilakukan melalui peningkatan belanja pemerintah dari semula 5,26% (YOY)



Sumber: BPS

**Gambar 3.**  
**Ekspansi Ekonomi dengan Kebijakan Fiskal**

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2 masa akhir tidak melakukan ekspansi karena sudah tidak dapat mengajukan diri sebagai presiden dan tidak terdapat calon presiden dari partai

di 2008Q1 menjadi 16.32% (YOY) di 2009Q2. Peningkatan belanja pemerintah dalam rangka ekspansi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo dengan cara



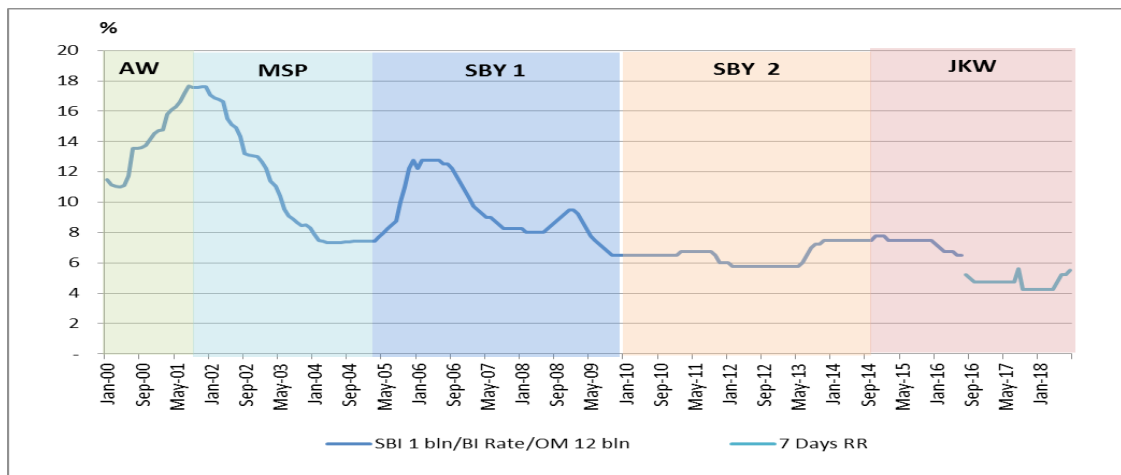
pembangunan infrastruktur.

Laju inflasi tertahan akibat ekspansi perekonomian periode sebelumnya, pada masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 1 mengurangi belanja fiskal dan bank sentral meningkatkan suku bunga kebijakan. Awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2, hanya dilakukan melalui konsolidasi fiskal (mengurangi belanja pemerintah). Suku bunga kebijakan bank sentral dipertahankan (tidak naik) untuk menahan laju *capital inflow* yang berlebihan paska *Global Financial Crisis* pada tahun 2008-2009 (mengurangi efek *sudden reversal*).

pemerintahan JKW, bank sentral harus menjaga stabilitas nilai tukar sehingga suku bunga kebijakan naik.

### Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Jumlah Uang Beredar

Sejak awal masa pemerintahan JKW, perekonomian mengalami tantangan yaitu melemahnya sektor swasta sebagai dampak membayarnya perekonomian negara maju, terutama Amerika Serikat. Belanja pemerintah dipertahankan tinggi untuk menjaga koreksi pertumbuhan yang terlalu dalam. Suku bunga kebijakan bank sentral juga dipertahankan (tidak naik) untuk menstimulus sektor swasta.

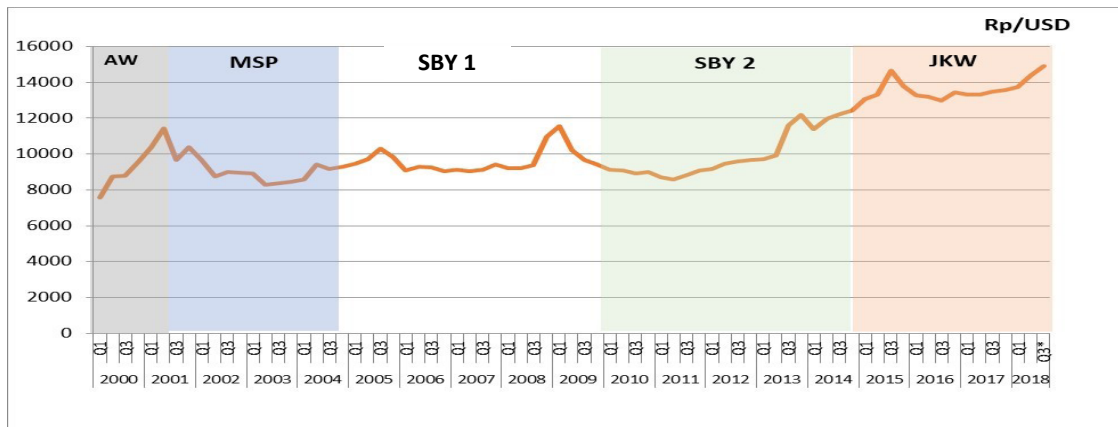


Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 4.**  
**Ekspansi Ekonomi dengan Kebijakan Moneter**

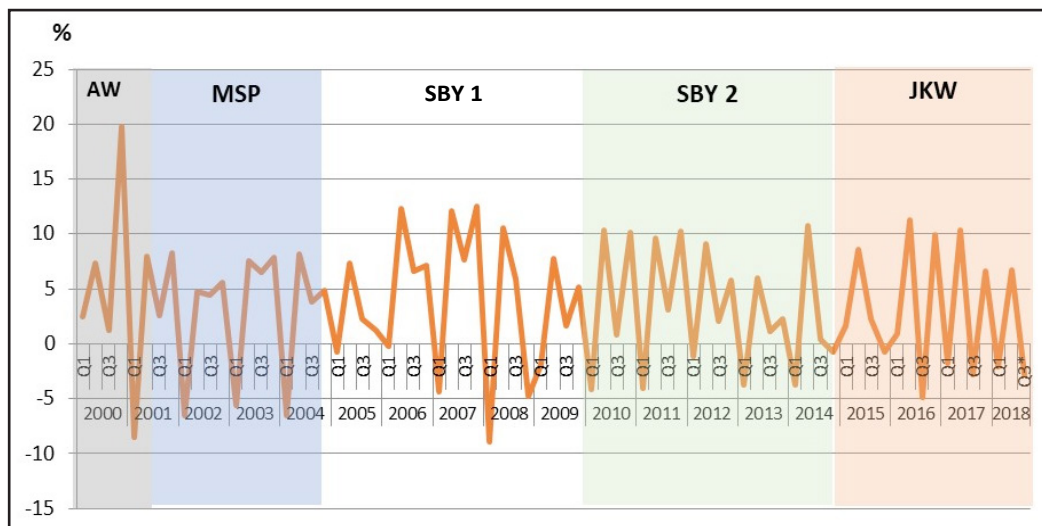
Gambar 4 dapat dilihat bahwa dari sisi kebijakan moneter, pada akhir pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono 1, bank sentral menurunkan suku bunga kebijakan untuk mendorong ekspansi ekonomi. Teori siklus politik, menunjukkan bahwa pada masa akhir pemerintahan SBY-2 tidak melakukan ekspansi ekonomi sehingga suku bunga kebijakan bank sentral dipertahankan dalam level yang sama. Sementara pada akhir

Nilai tukar nominal rupiah terhadap US\$ atau USD menunjukkan tren yang meningkat (depresiasi) menjelang pemilu kecuali pada masa pemerintahan SBY 1. Kemudian pasca pemilu, nilai tukar rupiah akan turun (apresiasi). Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD mulai tahun 2000:Q1 sampai dengan 2008:Q3 ditunjukkan oleh Gambar 5. Pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) seperti pada Gambar 6 menunjukkan pola yang acak tapi mengandung unsur *seasonal*.



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 5.**  
**Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap USD**



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 6.**  
**Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar**

#### Hubungan variabel makroekonomi dan moneter dengan Siklus Bisnis Politik: Analisis Ekonometrika

Dinamika inflasi adalah salah satu kunci penting untuk memahami siklus bisnis politik. Periode pemilihan umum menyebabkan sensitivitas yang besar di sisi pemerintah untuk menjaga inflasi tetap stabil sebelum dan selama periode pemilu dan mengalihkannya di periode pasca pemilu. Setiap pemilihan umum biasanya partai oposisi menuduh pihak yang menang karena menggunakan

karakteristik pemilih yang *myopic* untuk meningkatkan kemungkinan mereka memenangkan pemilu. *Incumbent* kalah dalam pemilihan umum, meskipun menunda kenaikan harga, pihak yang menang akan kembali menuduh mantan petahana yang menyebabkan adanya beban ekonomi yang sangat besar dengan tidak mengatur harga yang seharusnya sehingga pemerintah baru yang akan segera menerima efek negatif di awal periode kemenangan (pemerintahan) mereka.



**Tabel 2.**  
**Hasil Estimasi**

$Y_t$	Konstanta	$Y_{t-1}$	$Y_{t-2}$	$Y_{t-3}$	$Y_{t-4}$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$R^2$
Inflasi	1.6297**	0.8446***	-0.0198	0.0587	-0.2034	-0.7494	0.8107	1.1498*	0.6945
	0.7349	0.1307	0.1736	0.1730	0.1235	0.7585	0.6283	0.6837	
PDB riil	32615.81	0.2460**	0.2196*	0.2006	0.3486***	10146.80	-14112.85	-1213.96	0.9836
	30558.85	0.1229	0.1252	0.1257	0.1260	23581.26	19141.94	20464.15	
PDB growth	1.9227***	0.8020***	-0.1658	0.1060	-0.0942	0.0310	-0.0530	-0.0612	0.5547
	0.5809	0.1201	0.1386	0.1249	0.1063	0.2493	0.1981	0.2184	
M1	18434.45**	-0.4055***	0.0152	0.1211	0.6881***	10506.86	-19661.19**	-2390.60	0.7228
	7142.436	0.0930	0.1035	0.1041	0.0972	8928.62	7082.22	7796.88	
Kurs	-53.0948	0.0733	-0.1368	0.0417	-0.1300	-296.11	372.7734**	160.0266	0.1306
	98.6743	0.1259	0.1204	0.1142	0.1132	211.33	168.7393	183.0938	

Keterangan: \* signifikan pada  $\alpha = 10\%$ , \*\* signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , \*\*\* signifikan pada  $\alpha = 1\%$   
Sumber: diolah

Hasil estimasi menggunakan OLS dapat dilihat pada Tabel 2, dimana variabel D3 pada persamaan inflasi signifikan secara statistik sebesar 10%. Hasil ini sejalan dengan teori PBC bahwa setelah periode pemilu inflasi akan meningkat sebesar 1,15 %. Sebaliknya selama periode pemilu ( $D_1$ ) inflasi akan turun. Periode sebelum pemilihan umum, ketika terjadi kenaikan harga akan dibiayai atau *dicounter* oleh pemerintah dalam bentuk subsidi kepada masyarakat dan kemudian pada akhirnya akan memiliki implikasi yang serius, akibatnya, defisit anggaran pemerintah naik dan menciptakan tekanan inflasioner serta masalah keberlanjutan utang dalam periode pasca pemilihan umum, meskipun bertanda negatif akan tetapi variabel  $D_1$  tidak signifikan secara statistik.

Variabel  $D_2$  pada persamaan jumlah uang beredar (M1) signifikan secara statistik sebesar 5 %. Hal ini sejalan dengan penelitian Alesina, Cohen, dan Roubini (1992) yang menggunakan M1 dalam regresinya, juga mendukung adanya siklus politik. Signifikansi variabel  $D_2$  menunjukkan adanya siklus bisnis

politik di sisi moneter, dimana kenaikan jumlah beredar itu kemungkinan digunakan oleh pemerintah untuk menjaga inflasi tetap stabil selama dan sebelum periode pemilihan umum, namun hasil estimasi pada Tabel 2 menunjukkan variabel  $D_2$  bertanda negatif. Hal ini berlawanan dengan teori PBC atau yang dihipotesiskan sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa siklus bisnis yang diwakili oleh variabel  $D_1$ ,  $D_2$  dan  $D_3$  tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel PDB riil dan pertumbuhan PDB riil. Sedangkan variabel  $D_2$  pada persamaan kurs signifikan secara statistik sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan adanya siklus bisnis politik di sisi moneter, dimana selama dan sebelum periode pemilihan umum kurs meningkat atau terjadi depresiasi.

## KESIMPULAN

Teori siklus bisnis politik menyatakan bahwa inflasi akan turun pada awal masa pemerintahan, namun untuk kasus Indonesia hanya terlihat pada masa awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (MSW) dan

Presiden Jokowi (JKW) seiring dengan koreksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hasil estimasi OLS juga menunjukkan bahwa selama periode pemilu inflasi akan turun, tetapi tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya, dengan tingkat signifikansi 10%, inflasi meningkat sebesar 1,15 % pasca pemilu. Selama kurun waktu 5 rezim pemerintahan, terlihat adanya siklus ekspansi pertumbuhan ekonomi pada akhir periode pemerintahan kecuali pada akhir pemerintahan SBY 2. Namun hasil estimasi untuk menguji hubungan PDB riil dan pertumbuhan PDB riil dengan siklus politik tidak signifikan. Sedangkan hasil estimasi untuk menguji hubungan jumlah uang beredar dan kurs dengan siklus politik signifikan secara statistik sebesar 5 %. Akan tetapi hubungan negatif dari jumlah uang beredar dengan siklus politik berkebalikan dengan hipotesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus bisnis politik terjadi di Indonesia dari sisi moneter.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brender, A., & Drazen, A. (2008). How Do Budget Deficits And Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence From A Large Panel Of Countries. *American Economic Review*, 95(5), 2203–2220.
- Dritsaki, C., & Dritsaki, M. (2013). Phillips Curve Inflation And Unemployment: An Empirical Research For Greece. *Int. J. Computational Economics And Econometrics*, 3(1/2), 27–42.
- Hung, L.-C., & Hsieh, Y.-T. (2015). Political Business Cycle In Taiwan- Evidence From Central Government Expenditures. *International Journal Of Public Administration*, 39(4), 249–257.
- Kis-Katos, B. S. S. K., & Schulze, G. G. (2013). No Title. *Economics Letters*, 120(2), 342–345.
- Klose, J. (2012). Political Business Cycles And Monetary Policy Revisited-An Application Of A Two-Dimensional Asymmetric Taylor Reaction Function. *International Economics And Economic Policy*, 9(3–4), 265–295.
- Prabowo, E. D. (2016). Pengaruh Faktor Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/ Kabupaten Di Indonesia Ta 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 97–107.
- Sieg, G., & Batool, I. (2012). Pakistan, Politics And Political Business Cycles. *Pakistan Development Review*, 51(2), 153–166.
- Sukanto. (2015). Fenomena Inflasi, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Pendekatan Kurva Philips Dan Hukum Okun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 32(2), 96–106.
- Winoto, A. H., & Falikhatun. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilu 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 75–91.